TINDAK LANJUT PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR UTARA DALAM PENINGKATAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

Oleh :
Dr. Enjang Sudarman, M.Si

Latar Belakang

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Batasan di atas menunjukkan bahwa garis batas nyata wilayah pesisir tidak ada. Batas wilayah pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di daerah pesisir yang landai dengan sungai besar, batas ini dapat berada jauh dari garis pantai. Di tempat yang berpantai curam dan langsung berbatasan dengan laut dalam, wilayah pesisirnya akan sempit.

Untuk kepentingan pengelolaan atau untuk wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir ke arah daratan bisa sampai ke daerah hulu sungai apa bila di situ terdapat kegiatan manusia yang secara nyata menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sumber daya di bagian hilir (Rochmin Dahuri et al., 1996). Ke arah laut, cenderung menyesesuaikan dengan batas juridis yang berlaku di setiap provinsi.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyusunan RTL Pengelolaan Kawasan Pesisir ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Penyusunan Perencanaan Makro Kawasan Pesisir.

Tujuan studi ini adalah menentukan kegiatan-kegiatan masyarakat pesisir khususnya yang berkerja sebagai nelayan tradisional menjadi tenaga yang dapat bekerja pada bidang lain yang dapat dikembangkan pada daerah-daerah pesisir, seperti pada musim angin barat dan gelombang besar mereka tidak tidak dapat menangkap ikan sehingga perlu ada kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan pasyarakat pesisir.

Metodologi

Dalam rangka melakukan Penyusunan RTL Pengelolaan Kawasan pesisir Kabupaten Karawang, ada serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh konsultan yang meliputi :

a. Perumusan dan Penetapan Alat Pengumpulan Data dan Analsis
   - Pendataan secara random/acak yang dapat mewakili dari setiap lapisan masyarakat yang langsung mendapatkan usaha dari kegiatan nelayan, masyarakat yang hanya sebagai penunjang kegiatan nelayan dan masyarakat yang usahanya dipengaruhi oleh kegiatan nelayan.
   - Melakukan pendataan kegiatan yang dilakukan masyarakat pesisir.
   - Memproses data dan informasi (primer dan sekunder), menganalisis faktor-faktor yang dapat dijadikan acuan dalam Penyusunan RTL Pengelolaan Kawasan Pesisir.
   - Menentukan kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat pesisir dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan konservasi

hutan, tanah dan air serta budidaya ikan.

b. Perumusan rencana Penyusunan RTL Pengelolaan Kawasan Pesisir
   - Menentukan jenis kegiatan masyarakat dan kelembagaannya.
   - Menentukan anggaran biaya yang dibutuhkan bagi setiap kegiatan , baik untuk pembinaan maupun kelembagaan.
   - Mengkaji dampak yang mungkin timbul akibat adanya alih kebiasaan mayarakat pesisir.
   - Menetapkan lokasi kegiatan dan jenis kegiatan yang sesuai dengan karakterisitik masyarakat dan daerah, baik dari segi sosial, ekonomi dan budaya.

Visi Rencana Strategis Pengembangan Wilayah Pesisir Utara

Dengan mempertimbangkan kecenderungan global dan kebijakan pembangunan nasional sebagai unsur peluang atau ancaman serta kondisi sarana – prasarana, sumber daya manusia, sumber daya alam wilayah pesisir sebagai unsur kekuatan dan kelemahan maka di susun visi pengelolaan wilayah pesisir utara Kabupaten Karawang. Visi yang ingin di capai adalah :

"Terwujudnya pengembangan sumber daya wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan dan penegaka hukum, serta penataan ruang untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat "

Issu Strategis Utama Kawasan Pesisir Utara kab.Karawang

Penyusunan strategi disusun atas dasar issu strategis (utama). Proses penentuan issu utama ini dimulai dengan penentuan skala masalah yang diperoleh dari pernyataan atau aspirasi daerah. Ditindak lanjuti dengan mengadakan *ground truth observation* dan studi literatur di semua Kabupaten.

Proses kedua setelah penetapan skala masalah adalah penentuan bobot yang didasari oleh aspek pentingnya (*urgensi*) issu. Tingkat urgensi dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan dan sejauh mana issu yang bersangkutan berperan sebagai akar masalah penyebab issu lainya. Jika suatu issu memiliki dampak dan akar masalah yang banyak, maka issu tersebut memiliki bobot yang tinggi, sebaliknya memiliki bobot yang rendah.

Proses terakhir adalah penentuan skala prioritas. Skala prioritas issu dinilai berdasarkan kombinasi antara skala masalah dan bobot. Dalam hal ini, dilakukan juga *regrouping* terhadap berbagai masalah yang dianggap sama penyebabnya aau memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Fenomena Kemiskinan (struktural, kultural)

Kemiskinan merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir dapat disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu
(1) kemiskinan struktural,
(2) kemiskinan super-struktural,
(3) kemiskinan kultural.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam. Hubungan antara variabel-variabel ini dengan kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Artinya semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas variabel-variabel ini maka kemiskinan semakin berkurang. Khusus untuk variabel struktur sosial ekonomi, hubungannya dengan kemiskinan lebih sulit ditentukan. Yang jelas bahwa keadaan

sosial ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar atau di lingkup nelayan menentukan kemiskinan dan kesejahteraan mereka.

Gambar 6. 1 Salah satu kegiatan keluarga miskin di pesisir pantai Karawang

Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Variabelvariabel superstruktur tersebut diantaranya adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan dalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan superstruktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah untuk mengatasinya. Kesulitan tersebut juga disebabkan karena kompetisi antar sektor, antar daerah, serta antar institusi yang membuat sehingga adanya ketimpangan dan kesenjangan pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini hanya bisa diatasi apabila pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, memiliki komitmen khusus dalam bentuk tindakan-tindakan yang bias bagi kepentingan masyarakat miskin. Dengan kata lain affirmative actions, perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandanganpandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan.

Kemiskinan secara struktural ini sulit untuk diatasi. Umumnya pengaruh panutan (patron) baik yang bersifat formal, informal, maupun asli (*indigenous*) sangat menentukan keberhasilan upaya-upaya pengentasan kemiskinan kultural ini.

Para pakar ekonomi sumberdaya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor yang dimaksud membuat sehingga nelayan tetap dalam kemiskinannya.

Smith (1979) yang mengadakan kajian pembangunan perikanan di berbagai negara Asia serta Anderson (1979) yang melakukannya di negara-negara Eropa dan Amerika Utara tiba pada kesimpulan bahwa kekauan aset perikanan (fixity and rigidity of fishing assets) adalah asalan utama kenapa nelayan tetap tinggal atau bergelut dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan aset tersebut adalah karena sifat aset perikanan yang begitu rupa sehingga sulit untuk dilikuidasi

atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan lain. Akibatnya pada saat produktivitas aset tersebut rendah, nelayan tidak mampu untuk mengalih fungsikan atau melikuidasi aset tersebut. Karena itu, meskipun rendah produktivitas, nelayan tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang sesungguhnya tidak lagi efisien secara ekonomis.

Subade and Abdullah (1993) mengajukan argumen lain yaitu bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan karena rendahnya opportunity cost mereka. Opportunity cost nelayan, menurut definisi, adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata lain, opportunity cost adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila opportunity cost rendah maka nelayan cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien. Ada juga argumen yang mengatakan bahwa opportunity cost nelayan, khususnya di negara berkembang, sangat kecil dan cenderung mendekati nihil. Bila demikian maka nelayan tidak punya pilihan lain sebagai mata pencahariannya. Dengan demikian apa yang terjadi, nelayan tetap bekerja sebagai nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakan.

Panayotou (1982) mengatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (preference for a particular way of life). Pendapat Panayotou (1982) ini dikalimatkan oleh Subade dan Abdullah (1993) dengan menekankan bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasaan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata beorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena way of life yang demikian maka apapun yang terjadi dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya. *Way of life* sangat sukar dirubah. Karena itu maka meskipun menurut pandangan orang lain nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupan itu.

Kurang Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat dalam PWP

Sebagian besar kawasan ekosistem alami yang terdapat di sepanjang pesisir utara Karawang telah berubah menjadi kawasan hunian dan budidaya tambak, permukiman dan perkebunan serta industri.

Penyebab utama kerusakan kawasan konservasi :

- Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya konservasi
- Pengawasan terhadap kawasan konservasi masih terbatas, karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- Kurangnya peran serta masyaralat dalam pengelolaan kawasan konservasi berubah menjadi kawasan hunian dan budidaya tambak, permukiman dan perkebunan serta industri.

Akibat yang ditimbulkan adalah :

- Adanya tekanan terhadap populasi dan habitat satwa liar yang dilindungi
- Menurunnya fungsi ekologis kawasan lindung dan cagar alam laut
- Koflik antara pengolal kawasan konservasi dengan masyarakat
- Masih berlangsungnya eksploitasi sumberdaya alam di dalam kawasan yang dilindungi

Adapun isue strategis (utama) di pesisir pantai utara Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut : Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Kurangnya Akses Terhadap IPTEK, Pencemaran Wilayah Pesisir, Erosi Pantai, Konflik Pemanfaatan Ruang, Kurangnya Penegakan Hukum.

Strategi Pengembangan Wilayah Pesisir Utara
Pengembangan Lahan potensial

Lahan potensial merupakan suatu ruang atau tanah yang berpotensi dan sesuai dalam melakukan berbagai jenis kegiatan menurut kriteria dan analisis yang telah dilakukan, maka arahan pengembangan untuk lahan potensial adalah :

1. Luas wilayah perencanaan sesuai untuk pengembangan kawasan perikanan dan pertambakan sehingga diharapkan meningkatkan produksi perikanan dan pertambakan guna menambah perekonomian penduduk dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah baru dengan penataan ruang yang baik, sehingga tercapai tata ruang kawasan pesisir utara Kabupaten Karawang yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam pengembangannya, juga meningkatkan fungsi kawasan perdesaan secara seras, selaras, seimbang antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat, serta mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.
2. Penanaman kembali tanaman mangrove di sekitar peisisr pantai, diharapkan dilakukan penanaman kembali mangrove dapat meminimalisir terjadinya abrasi pantai dan pendangkalan perairan pantai.
3. Pengembangan industri rumah tangga di wilayah pesisir utara Kabupaten Karawang diarahkan pada kemudahan dalam pendistribusian hasil industri ke pangsa pasar tedekat sehingga diharapkan produksi hasil industri meningkat pesat.
4. Pengembangan Pariwisata di beberapa wilayah Pesisir utara Kabupaten Karawang sangat berpotensi untuk dikembangkan sehingga diharapkan dalam perkembangannya akan dapat menambah pendapatan masyarakat dan meningkatkan perekonomian wilayan perencanaan.

Pengembangan Pemanfaatan Ruang

Sesuai dengan tujuan penataan ruang, yaitu tercapainya pemanfaatan ruang yang berkuailitas, maka konsep pemanfaatan ruang wilayah pesisir utara kabupaten Karawang meliputi strategi pemanfaatan kawasan lindung dan strategi pengembagan kawasan budidaya.

A. Pengembangan kawasan lindung

Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan sumberdaya alam di wilayah perencanaan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka untuk kepentingan jangka panjang perlu dimantapkan bagian-bagian wilayah yang akan atau tetap dipertahankan untuk berfungsi lindung. Pengembangan kawasan lindung ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim hidrologis, serta untuk mempertahankan keanekaragaman flora, fauna, tipe ekosistem dan keunikan alam yang menjadi aset wilayah perencanaan.

Didasarkan pada analisis terhadap permasalahan yang ada, maka arahan untuk mempertahankan kelestarian perlu adanya strategi pemantapan kawasan lindung yang berada di pesisir pantai dan sekitarnya sebagai berikut :

1. Meningkatkan luas kawasan hutan mangrove yang ada dan memerankan fungsi sebagai kawasan lindung, berarti kawasan hutan mangrove yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya perlu direhabilitasi termasuk menyelesaikan gangguan-gangguan yang dihadapi seperti penebangan liar, lahan kritis, dan lain-lain.
2. Daerah di sekitar pantai maupun sungai perlu dialih fungsikan menjadi fungsi lindung sehingga kondisi kawasan lindung dapat terjaga dari bahaya erosi akibat adanya perladanga liar.
3. Mengendalikan kawasan lindung dengan mengembangkan kawasan penyangga di sekitar pesisir pantai dan daerah sungai.

4. Penetapan zona – zona pengembangan perikanan atau kelautan, tambak dan pariwisata

B. Pengembangan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan diluar kawasan lindung, meliputi kawasan Budidaya perikanan, tambak dan pertanian (pedesaan) dan budidaya non pertanian (perkotaan) yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya perlu dimamfaatkan guna meningkatkan produksi dalam rangka mermenuhi kebutuhan manusia serta pembangunan pada umumnya.

Strategi pengembangan setiap kawasan budi daya adalah :

1. Pengembangan budidaya perikanan perlu dioptimalkan, hal ini dikarenakan menjadi sumber mata pencaharian penduduk setempat akan tetapi dengan pengoptimalan budidaya perikanan (kelautan) tersebut pngeksploitasian sumber alam tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekologi lingkungan sehingga akibat yang ditimbulkan tidak merusak lingkungan pesisir. Solusi atau strategi penanganan hal ini adalah pemerintah atau lembaga yang berwenang aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat setempat tentang cara pengembangan sumber daya pesisir yang baik dengen memperhatikan faktor pentingnya pemeliharaan lingkungan.
2. Budidaya mangrove harus terus dimaksimalkan, karena mempunyai peranan yang sangat penting bagi keseimbangan dan keindahan pesisir pantai selain untuk menahan laju pergerakan gelombang ombak juga dapat meahan proses abrasai pantai. Maka dengan begitu penting peranan hutan mangrove, kawasan pesisir pantai harus mengoptimalkan budidaya mangrove di sekitar pesisir pantai dan membuat suatu rencana kawasan lindung hutan mangrove disekitar peisisr pantai selain rencana tata ruang hutan mangrove perlu dilakukan penataan pemukiman disekitar pesisir pantai yang sesuai dengan UU yang berlaku dan juga kawasan kawasan lainnya. Hal ini perlu dilakukan karena banyak perbedaan pendapat tentang permasalahan perencanaan dan pengembagan tata ruang kawasan pesisir.
3. Banyaknya perairan umum alam maupun buatan serta sungai memungkinkan untuk pengembangan budidaya tambak di sekitar kawasan pesisir pantai akan tetapi dengan kondisi air yang terus menerus tercemar akibat pencemaran agroindustri mengakibatkan pengembagan budidaya tambak akan tersendat, maka dari itu rehabilitasi kawasan – kawasan daerah sungai yang mengelami pencemaran dan memperketat perizinan dan pengawasan terhadap agro industri agar limbah industri tidak dibuang sembarang.

6.1.1 Pengembangan Sarana Dan Prasarana

Berdasarkan kondisi wilayah, potensi dan kepentingan wilayah, maka sistem sarana dan prasarana di Pesisir utara Kabupaten Karawang yang diarahkan untuk pengembangan sarana dan prasarana. Strategi pengembangannya meliputi :

1. Peningkatan sarana pendidikan yang tingkat pelayanan terhadap masyarakat masih rendah, terutama SLTP dan SLTA sehingga perlu penambahan jumlah sekolah SLTP di beberapak Wilayah serta perlu pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Peningkatan sarana kesehatan baik itu tempat dan sumber daya manusianya, sehingga kesehatan masyarakat dapat terpenuhi.
3. Pemerintah daerah juga perlu melakukan percepatan dan prioritas pembangunan di bidang infrastrukktur terutama jalan antar desa yang banyak mengalami kerusakan, hal ini dirasakan penting karena prasarana jalan berfungsi sebagai percepatan dan kelancaran terhadap akses ekonomi masyarakat.
4. Terdapat sungai – sungai besar sebagai jaringan utama bagi prasarana irigasi sehingga

pengoptimalan dalam kegiatan pertanian, pertambakan ataupun kegiatan lainnya dapat berjalan lancar dan diharapkan wilayah peisisr utara Kabupaten Karawang tidak kekurangan air.

5. Dengan beraneka ragamnya jenis kegiatan di Wilayah perencanaan dan juga pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat perlu Dibuatnya Tempat Pembuangan Sampah terakhir agar limbah dari berbagai kegiatan tersebut dapat terakomodir dengan baik dalam satu tempat sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

6.1.2 Pengembangan Ekonomi Wilayah

Laju pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari dukungan empat (4) faktor utama yaitu : Sumber daya manusia, Sumber daya alam, Sumber dana, Pemasaran.

Keempat faktor tersebut satu sama lain saling berkaitan dan merupakan rangkaian mekanisme perekonomian.

Adapun Konsep dasar pengembangan sosial ekonomi diuraikan sebagai berikut :

a. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang potensional untuk dikembangkan diantaranya ialah :

- Lahan, yaitu lahan untuk pengembangan kegiatan perikanan dan non perikanan seperti home industri, lain-lain.
- Bahan galian/tambang, seperti galian C
- Panorama yang indah, yaitu untuk pengembangan kepariwisataan.

b. Peningkatan sumber dana, baik dari masyarakat, swasta, pemerintah. Dalam rangka meningkatkan dana investasi yang bersumber dari masyarakat dan swasta perlu ditunjang dengan adanya kemudahan-kemudahan serta ketersediaan prasarana dan sarana yang disiapkan oleh pemerintah.

c. Peningkatan pemasaran, pemasaran merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran / laju perekonomian.

Strategi pengembangan sosial ekonomi di wilayah pesisir Kabupaten Karawang dilakukan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Perkembangan Wilayah Perencanaan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor.
2. Perkembangan ekonomi ini langsung berpengaruh terhadap perkembangan penduduk, tenaga kerja dan permintaan akan lahan. Terus terjadi peningkatan investasi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah perencanaan.
3. Perkembangan wilayah perencanaan masih mengalami krisis ekonomi sehingga sulit untuk menarik investasi besar.
4. Perkembangan ekonomi lebih dipengaruhi faktor internal wilayah p[erencanaan, terutama oleh aspek jumlah dan kualitas penduduk wilayah perencanaan.
5. Pertumbuhan penduduk wilayah perencanaan diasumsikan tumbuh linier karena relatif kecilnya pengaruh pendukung.
6. Krisis ekonomi sedikit demi sedikit mulai kurang pengaruhnya wilayah pesisir Kabupaten Karawang.
7. Investasi terjadi dengan mengandalkan investasi dari dalam negeri.
8. Pertumbuhan penduduk tumbuh dan langsung berpengaruh dalam penyediaan lapangan kerja dan ikut mendorong perkembangan ekonomi wilayah perencanaan. Perkembangan penduduk dan ekonomi langsung berpengaruh terhadap kebutuhan lahan pengembangan.

6.1.3 Pengembangan Kegiatan Ekonomi unggulan

Strategi pengembangan kegiatan ekonomi unggulan di Wilayah pesisr utara Kabupaten Karawang, dilakukan berdasarkan analisis Potensi dan permasalahan ekonomi yang ada. Analisis ini merupakan analisis dalam sektor perekonomian untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu dan komoditi unggulannya.

- Kawasan Pengembangan Perikanan

Kawasan pengembangan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi perikanan baik berupa hasil tangkap laut, pertambakan/kolam perairan darat lainnya. Kawasan pengembangan perikanan merupakan salah satu potensi untuk dapat berhasilnya tujuan pembangunan perikanan.

Pengembangan budidaya perikanan di Wilayah Peisisr uatara kabupaten Karawang, diarahkan pada kegiatan agrobisnis dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan nelayan ikan yang berpendapatan rendah melalui peningkatan produksi dengan sasaran meliputi :

- Peningkatan pendapatan petani ikan
- Peningkatan penyediaan ikan dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan perkapita
- Membantu meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif
- Membantu meningkatkan pertumbuhan agroindustri untuk meningkatkan pendapatan daerah
- Kelestarian mutu lingkungan usaha penangkapan dan budidaya ikan

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka program – program yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan penyuluhan perikanan
- Pembinaan sumberdaya alam dan lingkungan
- Peningkatan produksi perikanan
- Peningkatan aparatur perikanan
- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan
- Peningkatan perencanaan dan statistik perikanan

- Kawasan Pengembangan Industri Rumah Tangga

Kawasan pengembangan Industri Rumah Tangga adalah kawasan yang diperuntukan bagi Industri baik berupa Kerajinan Tangan dengan bahan dari laut atau pun pengolahan ikan asin. Kawasan pengembangan Industri merupakan salah satu potensi untuk dapat berhasilnya tujuan pembangunan perekonomian daerah.

Pengembanan industri rumah tangga di wilayah perencanaan diarahkan agar masyarakat setempat mempunyai banyak kegiatan – kegiatan yang menambah pendapatan ekonominya selain hanya mengandalakan kegiatan nelayan sehingga lambat laun masyarakat setempat terhindar dari kemiskinan.

Industri rumah tangga di wilayah perencanaan sudah ada beberapa dan harus terus dikembangkan serta dioptimalkan, kriteria lokasi yang baik bagi industri ini adalah :

- Tersedianya sumber air baku yang cukup
- Adanya sistem pembuangan air limbah
- Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat
- Tidak beririgasi di kaasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi atau yang berpotensi untuk pengembangan irigasi kawasan yang berfungsi lindung dan atau kawasan hutan produksi tetap dan terbatas.

Berdasarkan potensi dan kepentingan wilayah, maka pengembangan industri rumah tangga di Pesisir utara Kabupaten Karawang yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Strategi pengembangannya meliputi :

- Pembinaan dan penyuluhan tentang cara – cara pengolahan ikan asin dan pengolahan kerajinan kulit ikan pari dari pemerintah daerah.

- Memberikan pinjaman – pinjaman lunak dari pemerintah daerah atau lembaga yang berwenang untuk pengembangan industri ini serta pendampingan oleh lembaga terkait dalam proses penggunaan pinjaman tersebut.
- Peningkatan penyediaan bahan baku dalam rangka meningkatkan produksi industri rumah tangga.
- Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir untuk pengolaha ikan dan kerajinan agar masyarakat pesisir mampu dalam membuat ikan olahan serta mampu menangkap keinginan pasar
- Dalam memasarkan hasil produksi pada umumnya masyarakat peissir tidak banyak mempunyai informasi pasar yang memadai sehingga hasil produksi yang ada mengalami over limit , agar hal ersebut dapat terhindarkan maka perlu dibentuk suatu kelompok usaha bersama (Koperasi) sehingga pemasaran hasil pengolahan ikan asin dan kerajinan tangan dapat di jual ke koperasi.

- Kawasan pengembangan Pariwisata

Pesisir pantai dan laut merupakan salah satu obyek wisata yang paling diminati oleh setiap masyarakat manapun, dan setiap wilayah atau daerah peisisr yang mempunyai obyek wisata tersebut selalu akan meningkatkankan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan kesimpulannnya sektor kepariwisataan sangat membantu dalam peningkatakan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian wilayah tersebut.

Dengan asumsi tersebut obyek wisata di wilayah pesisir utara kabupaten Karawang harus terus dikembangkan dengan tujuan meingkatkan perekonomian wilaah tersebut.

Lebih lanjut potensi – potensi wisata yang terdapat di wilayah perencanaan antara lain adalah sebagai berikut :

❖ Wisata Alam :

Sebagai daerah dengan tipe dataran rendah dan pesisir pantai, karakteristik wisata alam di wilayah perencanaan adalah wisata pantai dan wisata hutan (mangrove). Obyek wisata alam tersebut antara lain adalah :

- Pantai tanjung pakis di Desa Tanjungpaksi Kecamatan pakis jaya
- Pantai Pisangan di Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya
- Pantai Pasirputih di Desa Sukajaya Kecamatan Cilamaya
- Wanawisata (Wisata pantai dan hutan mangrove) cikeong di Desa Sedari Kecamatan Cibuaya.

❖ Wisata Ziarah

- Makam para bupati Karawang di Desa manggungjaya Kecamatan Cailamaya

❖ Wisata Sejarah

- Situs Purbakala Candi Jiwa di Desa Segaran Kecamatan Batujaya
- Situs Purbakala candi Lanang dan Candi Wadon di Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya

Sektor kepariwisataan di wilayah perencanaan ibni sangat berpotensiuntuk dikembangkan sehingga diharapkan dalam perkembangannya akan dapat menambah pendapatan masyarakat dan meningkatkan perekonomian wilayah perencanaan.

Untuk mengoptimalkan potensi wisata yang ada, maka diperlukan usaha – usaha antara lain :

Membuat kebijaksanaan mengenai penataan ruang wisata, seperti : Rencanan Induk Pariwisata Daerah (RIPDA), Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW), dan rencana wisata – wisata lainnya

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata

Perlibatan partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan kegiatan wisata tersebut.

6.1.4 Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan, pendapatan nelayan, peningkatan ketrampilan nelayan yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial nelayan.

Hasil pengamatan di lapangan dan di dukung oleh informasi serta data yang ada, kegiatan perikanan tangkap di Karawang secara umum masih belum berkembang, karena sebagian besar adalah nelayan tradisional dengan kapasitas usaha relatif kecil dan daya jelajah yang terbatas.

Dalam rangka mengelola perikanan tangkap di Karawang yang perlu mendapat perhatian adalah para nelayan kecil, yang menangkap ikan menggunakan perahu tanpa motor atau hanya menggunakan motor tempel sampai 5 PK. Untuk itu, dalam rencana kegiatan pengelolaan ini salah satunya yang penting adalah pemberian bantuan sarana/modal usaha yang perlu dilakukan dalam waktu dekat. Bantuan ini dapat dikelola bersama-sama dengan sistem perguliran, dimana nelayan/kelompok nelayan yang mendapat bantuan nantinya diharuskan dapat menggulirkan bantuan serupa yang pernah diterimanya kepada nelayan/kelompok nelayan lainnya, begitu seterusnya. Pengaturan pengelolaan bantuan-bantuan ini seyogyanya dapat dikoordinir oleh Dinas Perikanan dan Kelautan setempat.

Dalam pengembangan perikanan tangkap di Karawang, telah disusun beberapa program dan kegiatan-kegiatan, diantaranya yaitu: program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan, program pengembangan fasilitas pembiayaan untuk pengembangan usaha nelayan, mengembangkan jalur-jalur pemasaran dan mengembangkan sarana penunjang yang mendukung usaha perikanan. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan diarahkan untuk meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain adalah bantuan paket motor penggerak, bantuan rumpon dan pengadaan beberapa unit penangkapan yang efektif. Kegiatan pelatihan diperlukan untuk peningkatan kualitas nelayan, diantaranya adalah meningkatkan kemampuan nelayan kecil dalam hal penguasaan pengoperasian alat tangkap di perairan lepas pantai. Program mengembangkan fasilitas pembiayaan untuk pengembangan usaha nelayan diarahkan untuk memudahkan nelayan mendapatkan modal kredit usaha. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah penyediaan sistem kredit untuk usaha perikanan baik melalui lembaga keuangan maupun bank komersial. Program mengembangkan jalur-jalur pemasaran diarahkan untuk menyediakan informasi tentang pemasaran hasil-hasil perikanan. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya pembangunan balai informasi.

Program pengembangan sarana penunjang dalam mengembangkan perikanan tangkap seyogyanya didorong sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pengembangan ini agar dapat menuju kapasitas optimalnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain membangun cold strorage, membangun dan memperbaiki TPI, membangun bengkel kapal/alat tangkap dan membangun sarana transportasi.

6.1.5 Pengembangan Budidaya Perikanan

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa tingkat pemanfaatan potensi budidaya perairan di Kabupaten Karawang masih relatif sangat rendah, baik pemanfaatan potensi lahan maupun potensi produksinya. Padahal sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, merupakan sektor andalan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Karawang secara umum, dan sekaligus dapat berperan sebagai penggerak serta penarik sektor-sektor lain untuk turut berperan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Karawang, seperti perdagangan, pertanian, jasa, dan industri pengolahan. Bahkan sektor budidaya perairan, akan mempunyai peran yang cukup besar di masa mendatang dalam pengembangan perikanan dan kelautan apabila dari sektor perikanan tangkap sudah mengalami over fishing. Oleh karena itu, perlu dirumuskan program-program pengembangan budidaya perairan dalam rangka mengoptimalkan tingkat pemanfaatan potensi budidaya perairan adalah seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Program-program Optimalisasi Tingkat Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan untuk Kegiatan Pengembangan Budidaya Perairan

No.	Program	Lokasi (Kecamatan)
A.	a. Ekstensifikasi lahan budidaya	Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tempuran, Cilebar, Pedes, Cibuaya, Tirtajaya, Pakisjaya
	b. Intensifikasi aktivitas budidaya	Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tempuran, Cilebar, Pedes, Cibuaya, Tirtajaya, Pakisjaya
B.	a. Kerjasama dengan swasta dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan	Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tempuran, Cilebar, Pedes, Cibuaya, Tirtajaya, Pakisjaya
	b. Perbaikan dan peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan pelatihan bidang budidaya perairan	Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tempuran, Cilebar, Pedes, Cibuaya, Tirtajaya, Pakisjaya
	c. Pengiriman SDM daerah untuk belajar dan berlatih tentang berbagai teknologi budidaya perairan	Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tempuran, Cilebar, Pedes, Cibuaya, Tirtajaya, Pakisjaya
	d. Pendampingan teknologi	Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tempuran, Cilebar, Pedes, Cibuaya, Tirtajaya, Pakisjaya
	e. Pengembangan kelembagaan dengan pola kemitraan	Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tempuran, Cilebar, Pedes, Cibuaya, Tirtajaya, Pakisjaya

Program-program utama untuk meningkatkan produktivitas usaha budidaya perairan dalam rangka optimalisasi tingkat pemanfaatan potensi pengembangan budidaya perairan di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

a. Ekstensifikasi lahan budidaya perairan

Program ekstensifikasi lahan budidaya perairan wilayah pesisir merupakan program optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan berupa perluasan area budidaya perairan, baik perluasan areal budidaya laut maupun air payau, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Program ekstensifikasi ini harus dilakukan dengan benar dan tepat artinya calon lokasi perluasan lahan budidaya tersebut benar-benar potensial untuk pengembangan budidaya perairan dan kelestarian lingkungan di sekitarnya harus tetap terjaga. Oleh karena itu, pelaksanaan program ekstensifikasi ini harus didahului dengan kajian yang mendalam dari berbagai aspek, terutama teknis, sosial dan ekonomi-finansial.

b. Intensifikasi kegiatan budidaya perairan

Program intensifikasi kegiatan budidaya perairan wilayah pesisir merupakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan potensi produksi sumberdaya perikanan dan kelautan, berupa budidaya perairan, dengan melalui peningkatan teknologi budidaya perairan. Salah satu permasalahan dalam pengembangan budidaya perairan di Kabupaten Karawang ini adalah rendahnya produktivitas lahan budidaya perairan, baik produktivitas lahan budidaya air payau maupun budidaya laut. Rendahnya produktivitas lahan budidaya ini salah satunya dikarenakan tingkat teknologi budidaya yang diterapkan masih rendah atau tradisional. Dengan tingkat teknologi budidaya yang rendah ini, maka peningkatan produktivitas lahan budidaya juga akan minimal sekali sehingga pemanfaatan potensi produksi budidaya perairan yang tinggi tidak akan pernah optimal.

Juga, yang perlu diperhatikan adalah pemilihan tingkat teknologi yang tepat. Pemilihan teknologi yang tepat ini salah satunya bisa dikaitkan kondisi ketenagakerjaan. Apabila angka pengangguran relatif tinggi, maka teknologi yang digunakan hendaknya teknologi yang padat karya dimana pemakaian tenaga kerja lebih diutamakan. Namun apabila kondisi pengangguran relatif rendah, maka teknologi yang digunakan dapat berupa teknologi padat modal yang tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Namun demikian, langkah yang aman adalah memilih teknologi-teknologi pada skala netral (netral scale) karena teknologi ini dapat digunakan pada berbagai skala industri baik kecil, menengah dan besar dengan tetap memberikan produktifitas dan output produksi yang tinggi sesuai dengan skala usahanya. Contoh teknologi yang bersifat netral scale adalah penggunaan bibit unggul pada budidaya ikan.

c. Peningkatan sistem permodalan

Ketersediaan modal merupakan salah satu faktor sangat diperlukan dalam pengembangan model ini, karena tanpa adanya modal, segala aktifitas produksi tidak akan jalan. Ketersediaan modal akan berdampak kepada peningkatan kapasitas usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi dan produktifitas para nelayan dan petani ikan.

Permasalahan permodalan yang selama ini dihadapi para petani ikan/udang terutama disebabkan ketidakmampuan lembaga keuangan formal untuk memberikan kredit kepada para petani ikan/udang karena sektor perikanan dipandang sebagai sektor usaha yang mempunyai resiko tinggi (**high risk**).

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah permodalan untuk mendukung implementasi strategi dan program utama, diperlukan strategi peningkatan sistem permodalan. Adapun program pendukung untuk mengimplementasikan strategi peningkatan sistem permodalan tersebut adalah :

"Program kerjasama antara petani ikan/udang dengan para pengusaha swasta, terutama yang bergerak di bidang perikanan, dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan".

d. Peningkatan kapasitas SDM

Sumberdaya manusia bidang perikanan dan kelautan sangat diperlukan dalam pengembangan model ini, karena dia merupakan pelaku yang bersifat aktif melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. Sumberdaya ini yang nantinya akan menggerakkan sumberdaya lain dalam rangka meningkatkan output produksi maupun meningkatkan efisiensinya. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas SDM, baik kuantitas maupun kualitas, untuk mendukung implementasi strategi utama, yaitu peningkatan produktivitas budidaya perairan.

Adapun program-program pendukung yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan strategi peningkatan kapasitas SDM dan mendukung pelaksanaan program-program utama adalah sebagai berikut :

a. Perbaikan dan peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan pelatihan bidang budidaya perairan
b. Pengiriman SDM daerah untuk belajar dan berlatih tentang berbagai teknologi budidaya perairan
c. Pendampingan teknologi budidaya perairan

e. Peningkatan sistem kelembagaan

Kelembagaan yang dimaksud atau diprioritaskan dalam program ini adalah kelembagaan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan program-program utama. Dalam konteks Kabupaten Karawang dan budidaya perairan, dimana kapasitas SDM di bidang budidaya perairan masih rendah, maka program kegiatan yang dilakukan untum

mengimplementasikan strategi peningkatan sistem kelembagaan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi budidaya perairan dan mendukung pelaksanaan program-program utama adalah : "Program pengembangan kelembagaan budidaya perairan dengan pola kemitraan".

6.1.6 Program Penanganan Erosi Pantai

A. Penanganan dengan Pendekatan Keras (Hard Measures)

Selama ini penanganan perlindungan kawasan pesisir terhadap erosi pantai masih banyak dilakukan dengan menggunakan pendekatan "keras" yaitu dengan membuat pelindung pantai yang secara estetis dan ekologis kurang ramah. Penanganan juga sifatnya sporadis dan kurang komprehensif, sehingga menimbulkan masalah baru yaitu hanya akan memindahkan lokasi terjadinya erosi dari tempat yang telah dilindungi ke tempat lain di sekitarnya yang kurang mendapat perhatian. Sehingga masalah-masalah seperti disebutkan di atas akan tidak pernah akan terselesaikan, yaitu hanya akan memindahkan masalah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya.

Upaya untuk mengatasi masalah erosi dan abrasi secara "text book" antara lain dilakukan dengan pendekatan *hard measures*, yakni dengan membuat bangunan-bangunan pantai seperti: tembok laut, pelindung tebing (*revetment*), groin, jetty, krib sejajar pantai, dan tanggul laut.

B. Penanganan dengan Pendekatan Lunak (Soft Measures)

Beberapa cara penanganan dengan pendekatan lunak antara lain dapat dilakukan dengan: peremajaan pantai, pembentukan dune, peremajaan dan restorasi mangrove, rehabilitasi koral, artificial reef, serta pengelolaan/manajemen kawasan pantai secara terpadu, diantaranya : *Peremajaan pantai, Pembentukan dune, Rehabilitasi mangrove, Rehabilitasi koral.*

Pengembangan Prasarana dan Sarana

A. Transportasi Darat

Jaringan jalan di Kabupaten Karawang mengacu pada sistem hirarki kota dan RTRW Kabupaten Karawang, dimana jaringan jalan terbagi atas :

- Kota orde II : dihubungkan dengan jaringan jalan arteri sekunder.
- Kota orde III : dihubungkan dengan jaringan jalan kolektor sekunder dan jalan lokal

Dalam pelaksanaan tatanan tersebut tidak kaku sehingga tidak menutup kemungkinan adanya jaringan jalan arteri primer kota orde II memasuki kota orde III atau sebaliknya.

Program pengembangan prasarana jalan diarahkan untuk : Pengembangan jalan kecamatan, Pengembangan jalan lokal/desa, Pembuatan jembatan penghubung antara desa-desa dan kecamatan.

Disamping pengembangan sistem jaringan jalan tersebut di atas, juga diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan prasarana sub terminal yang merupakan simpul-simpul dalam sistem jaringan transportasi local desa dan antar kecamatan di wilayah pesisir utara Kabupaten Karawang yang terpadu dengan moda transportasi lainnya (**intermoda transportation system**) sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing desa dan kecamatan.

Sistem jaringan perhubungan antara PPI dan PPS dapat dilakukan baik melalui jalur laut maupun jalur darat. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa jaringan perhubungan darat antar PPI-PPS banyak bertumpu pada pusat orde II (Kec. Cilamaya. Dengan demikian, posisi jalur pusat orde IIi dalam sistem pemasaran produk tangkapan sangat penting.

Untuk pengembangan sistem agribisnis yang bersifat lokal, sistem jaringan jalan kurang mendukung kelancaran pemasaran, sehingga perlu pengembangan dan rekontruksi. Rehabilitasi jaringan jalan agar mempermudah dan memperlancar pengangkutan ikan baik yang menuju TPI maupun TPHT.

B. Transportasi Laut

a. *Pelabuhan Umum*

Program pengembangan Pelabuhan Umum di arahkan untuk menjadi Pelabuhan Pendaratan Ikan Utama di wilayah pesisir utara Karawang yang mampu mengakomodir arus produksi hasil tangkap ikan, antar desa, kecamatan dan kabupaten. disamping juga sebagaidermaga sandar kapal-kapal nelayan pada saat mendarat.

Sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, setiap aktivitas pelabuhan didalam rencana induk pengembangannya harus mengakomodasikan rencana pemanfaatan ruang/lahan yang meliputi: (1) rencana peruntukan lahan daratan atau **land use plan**, dan (2) rencana peruntukan perairan atau **water area plan**.

Rencana peruntukan lahan dan perairan dimaksudkan untuk dapat menentukkan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi : Kegiatan jasa kepelabuhanan, Kegiatan pemerintahan, Kegiatan jasa kawasan, Kegiatan penunjang kepelabuhan.

Berdasarkan arahan pengembangan pelabuhan pendaratan ikan utama di Karawang, dan alokasi rencana pemanfaatan ruang, maka program pengembangan pelabuhan disisi daratan mencangkup :

Fasilitas pokok, yaitu bangunan yang langsung diperlukan untuk operasional kepelabuhan, antara lain : Dermaga (**wharf**), Gudang lini I, Lapangan penumpukan lini I, Terminal penumpang, Terminal Ro-Ro, Fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah, Fasilitas pemadam kebakaran, Fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun (B3), Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sarana baru navigasi pelayaran (SBNP). Fasilitas penunjang, yaitu bangunan yang secara tidak langsung berhubungan dengan operasional, namun diperlukan meskipun hanya menunjang aktivitas operasional kepelabuhanan, antara lain : Kawasan perkantoran, Fasilitas pos dan telekomunikasi, Fasilitas pariwisata dan perhotelan, Instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, Jaringan jalan, Jaringan air limbah, drainase dan sampah, Areal rencana pengembangan pelabuhan, Tempat tunggu kendaraan bermotor, Kawasan perdagangan, Kawasan industri, Fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, tempat rekreasi, olah raga, jalur hijau dan kesehatan).

Sedangkan untuk perairan (**water area plan**) program pemanfaatan ruang/lahan perairan untuk operasional kepelabuhanan mencangkup Fasilitas pokok, yang meliputi : Alur pelayaran, Perairan tempat labuh, Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, Perairan tempat alih muat, Perairan untuk kapal yang mengangkut bahan/barang berbahaya, Perairan alur penghubung intra pelabuhan, Perairan pandu, Perairan untuk kapal pemerintah, Fasilitas penunjang, antara lain meliputi, Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang, Fasilitas untuk pembangunan dan pemeliharaan kapal, Perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), Perairan tempat kapal mati, Perairan untuk kepentingan darurat, Perairan untuk kegiatan rekreasi (wisata air).

b. Pelabuhan Perikanan

Keberadaan PPS dan PPI harus didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang handal sehingga dapat menjamin tingkat aksesibilitas antar kawasan yang baik terutama akses jalan dari PPS per desa yang berperan sebagai pusat pengumpul hasil-hasil perikanan ke Pelabuhan Pendaratan Ikan Utama untuk keperluan distribusi ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. PPS di wilayah studi diharapkan mampu menampung ikan hasil tangkapan dari perairan utara Karawang. Sedangkan fungsi lain dari PPS di wilayah studi merupakan

pusat aktivitas perikanan antar desa, dan diharapkan mampu berperan serta mampu menampung hasil penangkapan ikan di perairan utara Karawang yang dilakukan oleh para nelayan dari berbagai PPI dan TPI yang berada diwilayah studi, yang selanjutnya di distribusikan ke wilayah kabupaten dan pasar regional melalui Pelabuhan Pendaratan Ikan Utama di Kecamatan Cilamaya.

Program pengembangan PPS di wilayah studi secara bertahap harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung perannya sebagai pelabuhan perikanan alternatif sebelum di distribusikan ke Pelabuhan Pendaratan Ikan Utama yang meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

Kesimpulan

1. Rencana Tindak Pengelolaan Pantai Utara Kabupaten Karawang Berdasarkan issu strategi utama tersebut diatas maka disusun rencana-rencana sebagai rencana tindak lanjut dari issu-issu tersebut, Adapun isue strategis (utama) di pesisir pantai utara adalah sebagai berikut :
   a. Fenomenda kemiskinan (struktural, kultural)
   b. Kurangnya kepedulan masyarakat terhadap lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam PWP
   c. Kerusakan Mangrove
   d. Kerusakan terumbu karang
   e. Penurunan stok ikan
   f. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya akses terhadap IPTEK
   g. Pencemaran akibat limbah industri / pabrik, rumah tangga dan lain-lain
   h. Erosi panti (abrasi) dan sedimentasi pantai (eksresi)
   i. Konflik pemanfaatan ruang
   j. Kurangnya penegakan hukum
2. Untuk menentukan pilihan pengelolaan, setiap pengelola perlu melakukan beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan ekonomis, pertimbangan lingkungan, dan pertimbangan sosial-budaya.
3. Guna pencapain tujuan pengembangan di wilayah perencanaan diantaranya adalah meningkatkan pertumbuhan wilayah, mempercepat pemerataan intra wilayah dan menciptakan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan.

Saran

1. Keluaran yang diharapkan dari Penyusunan RTL Pengelolaan Kawasan Pesisir Kabupaten Karawang adalah :
   a. Sebuah laporan final tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir sebagai langkah alternatif dalam memicu pengembangan wilayah kawasan pesisir dan sebagai usaha mencari jalan keluar agar masyarakat pesisir terangkat dari garis kemiskinan.
   b. Sebuah Rekomendasi tentang pengelolaan wilayah pesisir.
2. Strategis dan prospek yang cerah dari sumberdaya wilayah pantai (pesisir dan laut), terdapat berbagai kendala dan kecenderungan yang mengancam kapasitas berkelanjutan (Suistanable capasity) dalam menunjang kesinambungan pembangunan. Diantaranya pemanfaatannya yang berlebihan seperti pencemaran lingkungan dan turunnya dayadukung lingkungan (Rusaknya ekosistem hutan manggrove/bakau), abrasi laut dan sebagainya.

SOLUSI

Daftar Pustaka

Brandford David L, and Cohen Allan R, Managing for Excellence, The Guide to Developing Hingh Perfomance in Contemporary Organizations, New York John Wiley Sons Inc, 1997

Bryson, John M. Strategic Planning for Public and Nanprofit Organizations, San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1995

Cicin-Sain and R.W. Knicht, Integrated Coastal and Marine Management, Washintons Island Press, 1998

Dahuri, R,J Rais, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu, Jakarta, PT.Pradya Paramita, 1996.

Nybaken W.J Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologi, Jakarta, Gramedia, 1992

Somodiningrat G, Pemberdayaan Masyarakat JPS, Jakarta, Gramedia, 1999.

Savitri L.A dan M. Khozali, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pesisir, Bogor, WIPPKSPL IPB, 1999.

Thompsan Jr, Arthur A, Readings in Strategic Management, Texas, Business Publications Inc, 1984

William Dunn, Pengantar Analitis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjamada University Press, 1998

SOLUSI